

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah telah dilakukan banyak negara termasuk Indonesia. Otonomi atau desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Wujud desentralisasi ini berupa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih rakyat, memilih kepala daerah oleh rakyat dan adanya bantuan (transfer) dari pemerintah pusat. Menurut Nurhemi (2015) “Umumnya desentralisasi mencakup aspek politik, administratif dan fiskal”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 “Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah”. Menurut Halim (2011:135) “Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain”. PAD diperoleh dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang telah dimiliki daerah tersebut. Menurut Ningsih (2019) “Berdasarkan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dalam usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2005 “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. DAK dan DAU merupakan sumber bagi pemda untuk melakukan belanja modal sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Supartoyo, dkk (2013) :

Pertumbuhan Ekonomi merupakan pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat.



Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.1 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi adalah pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,36%, pada tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 4,21%, sedangkan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 terjadi peningkatan dalam jumlah yang kecil yaitu

sebesar 4,37%, 4,64% dan 4,71%. PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2015 mencapai 115.065,66 milyar rupiah. Selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, Meskipun tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Sealam jangka waktu 5 tahun, nilai PDRB ADHB meningkat sekitar 1,4 kali lipat.

Tabel 1.1

**PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2014-2018
(dalam milyar rupiah)**

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2014	144 814,42	119 991,44
2015	155 065,66	125 037,40
2016	171 199,47	130 501,13
2017	189 868,12	136 556,71
2018	208 378,56	142 995,28

Sumber : BPS Provinsi Jambi (www.jambi.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 jika dibandingkan antar provinsi di Pulau Sumatera, maka PDRB Provinsi Jambi menduduki peringkat ketujuh. Perannya terhadap pembentukan PDRB Pulau Sumatera tahun 2018 sebesar 6,44%, dengan adanya data tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi di pengaruhi oleh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembagunan tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan dalam pemerintahan daerah demi terwujudnya kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah yang mencerminkan

keberhasilan suatu daerah dalam desentralisasi fiskal. Peningkatan Pendapatan Asli daerah masih sangat minim di bandingkan dengan nilai dana perimbangan, Hal ini berarti penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB riil) lebih banyak dalam bentuk sumbangan dan bantuan pemerintah pusat.

Disparitas penerimaan dari Padaptan Asli Daerah (PAD) di beberapa daerah membuat pemerintah harus menyetarakan penerimaan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tercermin dari adanya penerimaan dari transfer pusat yang berasal dari pendapatan di APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum merupakan bagian terbesar dari alokasi dana perimbangan yang diperoleh daerah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisihan antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan tetap pada koridor tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 “Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah”. APBD harus mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah berisi informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaran pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran prestasi kerja.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan menstransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat.

Berdasarkan penelitian Dewi dan Saputra (2017) bahwa pendapatan asli daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, menurut Prantini (2014) pendapatan asli daerah, belanja modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/ Pemkot Provinsi Jambi Tahun 2014-2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/Pemkot Provinsi Jambi?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/Pemkot Provinsi Jambi?
3. Apakah Dana perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/Pemkot Provinsi Jambi ?
4. Apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/Pemkot Provinsi Jambi ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini di lakukan pada

pemerintah Provinsi Jambi dengan objek penelitian pada Pemkab/Pemkot Provinsi Jambi.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/ Pemkot Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan
3. Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/ Pemkot Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/ Pemkot Provinsi Jambi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemkab/ Pemkot Provinsi Jambi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, khususnya mengenai Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).
2. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan mampu menjadi referensi pemerintah daerah dalam Menyusun kebijakannya, khususnya kebijakan keuangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.